



Analisis Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru

Wulan Yumandari*¹, Hambali², Haryono³

^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

E-mail: wulan.yumandari2745@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id, haryono@lecturer.unri.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-05	<p>This research was motivated by the implementation of a new curriculum, namely the Merdeka Curriculum which was implemented at Madrasah Aliyah (MA) Diniyah Putri Pekanbaru in class X 2023-2024. Apart from that, some teachers still do not fully understand the implementation of the Independent Curriculum. Teachers and students are still in the curriculum adjustment stage, teachers also still have difficulty designing teaching modules and learning evaluation. The formulation of the research problem is how to implement the Merdeka Curriculum in learning Pancasila Education at MA Diniyah Putri Pekanbaru. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of the Independent Curriculum in Pancasila Education Learning at MA Diniyah Putri Pekanbaru. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses a qualitative method using the Miles and Huberman model data analysis technique. The findings in this research explain that the implementation of the Independent Curriculum in Pancasila Education Learning at MA Diniyah Putri Pekanbaru was carried out well as it should and was in accordance with the guidelines for implementing the Independent Curriculum. The obstacles and obstacles experienced are that the majority of teachers and students are not yet familiar with the Independent Curriculum so that it requires quite a long curriculum adjustment, facilities and infrastructure are still limited, and difficulties in developing teaching modules, limited time in creating teaching modules, as well as a lack of information and reference in implementing the Independent Curriculum.</p>
Keywords: <i>Independent Curriculum; Pancasila Education.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-05	<p>Penelitian ini di latar belakang oleh adanya pelaksanaan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Madrasah Aliyah (MA) Diniyah Putri Pekanbaru pada kelas X tahun ajaran 2023-2024, yang mana MA Diniyah Putri Pekanbaru bukan merupakan sekolah penggerak juga tidak terdapat guru penggerak di sekolah tersebut. Selain itu, sebagian guru masih belum memahami sepenuhnya mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Guru dan siswa masih dalam tahap penyesuaian kurikulum, guru juga masih kesulitan untuk merancang modul ajar dan evaluasi pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru. Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru terlaksana secara baik sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan panduan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kendala dan hambatan yang dialami yaitu sebagian besar guru dan siswa belum terbiasa dengan Kurikulum Merdeka sehingga membutuhkan penyesuaian kurikulum yang cukup lama, sarana dan pra sarana yang masih terbatas, dan kesulitan dalam mengembangkan modul ajar, keterbatasan waktu dalam pembuatan modul ajar, serta kurangnya informasi dan referensi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.</p>
Kata kunci: <i>Kurikulum Merdeka; Pendidikan Pancasila.</i>	

I. PENDAHULUAN

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional "Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan

ataupun mewujudkan suasana dalam proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara aktif dan mempunyai kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan akhlak mulia yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara” (Suryadi, 2018). Pendidikan begitu penting bagi bangsa Indonesia, ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pendidikan diharapkan kelak akan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, dapat melestarikan budaya dan tentunya dapat membangun peradaban menjadi bangsa yang beradab.

Perkembangan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang ada di bangsa tersebut (Angga et al., 2022:5878). Dalam sistem pendidikan harus memiliki sebuah kurikulum, artinya kurikulum adalah ruh dari pendidikan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kurikulum adalah acuan dan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan program pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah (Rahmadayanti et al., 2022:7175). Kurikulum merupakan sebuah instrument yang dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan diperlukan sebuah kurikulum yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman saat itu. Jadi kurikulum bersifat dinamis, yang mana akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum harus terus diperbarui dan berinovasi, jika kurikulum saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka kurikulum baru hadir sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya (Fussalam et al., 2018:46).

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami krisis pembelajaran (*Learning Crisis*) yaitu suatu situasi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara antara tujuan pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tidak dapat mencapai keterampilan atau tingkat pemahaman yang telah ditentukan. Maka untuk mengatasi adanya *learning crisis* (krisis pembelajaran) maka pemerintah membuat sebuah kebijakan pemulihan pembelajaran yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Kurikulum Merdeka sebagai upaya perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka mulanya disebut dengan kurikulum Prototipe, yang dikembangkan menjadi suatu kerangka kurikulum yang sifatnya

fleksibel yaitu bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing masing satuan pendidikan, kurikulum merdeka lebih berfokus pada pengembangan karakter peserta didik, materi pembelajaran yang esensial dan dan kompetensi anak didik. Tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah kebebasan dan wewenang kepada pihak sekolah untuk dapat mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah tersebut (Nugroho et al., 2022:377).

Kurikulum Merdeka memiliki konsep merdeka belajar yaitu kebebasan berfikir dan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik disekolah. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul sesuai dengan tuntutan abad ke-21 yaitu setiap pelajar dituntut untuk memiliki 16 keahlian yang terbagi kedalam tiga bagian utama yaitu pendidikan karakter, kompetensi dan literasi (Firdaus et al., 2022: 690). Pada kurikulum merdeka, setiap sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan serta mengelola kurikulum sesuai dengan kebutuhan karakteristik sekolah tersebut. Kurikulum Merdeka lebih relevan, interaktif dan fleksibel bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Pembelajaran yang ada dalam Kurikulum Merdeka dilakukan dengan berbagai kegiatan berbasis proyek, sehingga siswa akan menguasai kompetensi yang dibutuhkan didunia kerja kelak, seperti keterampilan bekerjasama dalam sebuah kelompok dan menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat (Mantra et al., 2022:6315). Setiap sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka hendaknya memiliki Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak dibuat oleh pemerintah yang berfokus pada hasil belajar siswa secara holistic dan meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakteristik (Syafi'i, 2022:40). Program Sekolah Penggerak adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan terciptanya Profil Pelajar Pancasila yang merupakan visi dari pendidikan Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, maka perlu dilakukan peningkatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah menggunakan platform belajar berupa *Learning Management System* (LMS), dan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan didampingi oleh instruktur. Pelatihan yang

didapatkan oleh sekolah Penggerak diantaranya yaitu IHT (*In house training*), *Project Management office* (PMO). Tidak hanya itu, sekolah bisa melaksanakan pelatihan mandiri atau berkelompok dengan *Focus Grup Discussion* (FGD), *Kelompok Kerja Guru* (KKG), Musyawarah Guru Perfase, dan lain sebagainya. Saat ini Kurikulum Merdeka juga telah diterapkan pada sekolah non penggerak.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka untuk sekolah non penggerak beracuan pada Diklat Implementasi Kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pra survei yang dilaksanakan di MA Diniyah Putri Pekanbaru diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah non penggerak yang telah menerapkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka pada kelas X tahun ajaran 2023-2024. Setiap sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka hendaknya memiliki guru penggerak namun berdasarkan hasil pra survei, diketahui bahwa di sekolah MA Diniyah Putri Pekanbaru tidak ada satupun guru penggerak. Namun walaupun demikian, pihak sekolah telah mengadakan pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka yang diikuti oleh seluruh guru yang berjumlah 20 orang. Kurikulum Merdeka ini baru pertama kali diterapkan sehingga masih banyak guru maupun peserta didik yang bingung dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka termasuk juga mengenai *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* (P5), guru yang mengajar kurang mendapatkan pelatihan khusus mengenai Kurikulum Merdeka, guru masih sulit beralih dari kurikulum sebelumnya. Guru masih kebingungan dalam mengisi format penilaian baru. Guru sebagai tenaga pendidik mengalami berbagai tantangan dalam menyambut pelaksanaan Kurikulum Merdeka salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran pendidikan pancasila adalah guru masih kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran, kerap kali terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran begitupun dengan asesmennya.

II. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dimana hasil penelitian ditulis dan diungkapkan dalam kalimat dan kata berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2021: 51), metode penelitian kualitatif disebut juga metode interpretatif

karena hasil penelitian cenderung mencerminkan interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di MA Diniyah Putri Pekanbaru Jl. KH. Ahmad Dahlan No.100, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan model Interaktif. Langkah analisis data menggunakan model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri Pekanbaru telah diterapkan pada kelas X tahun pelajaran 2023-2024 hal ini diperkuat dengan adanya dokumen SK Implementasi Kurikulum Merdeka MA Diniyah Putri Pekanbaru tercantum dalam SK Dirjen Pendis Nomor 1443 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023-2024 halaman 451 dengan nomor urut 658. Sebelum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sekolah harus mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan diantaranya adalah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka minimal dua kali dan mendaftarkan diri di sistem agar bisa menerapkan Kurikulum Merdeka. Madrasah Aliyah (MA) Diniyah Putri telah melaksanakan beberapa pelatihan yang menunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka diantaranya workshop implementasi Kurikulum Merdeka, pelatihan P5-PPRA (*Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*), kegiatan IHT (*In House Training*) *Menjadi Guru Hebat*, dan Kegiatan IHT (*In House Training*) *Game Based Learning*.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di MA Diniyah Putri ditemukan kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah guru masih kesulitan dalam merancang rencana pembelajaran dalam hal ini yaitu modul ajar. Meskipun telah dibekali dengan pelatihan modul ajar namun guru masih

kebingungan dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kendala berikutnya adalah guru kesulitan untuk menyamakan pembelajaran karena karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Sementara itu kendala yang dirasakan oleh siswa di MA Diniyah Putri Pekanbaru adalah kurangnya sumber belajar dan sulitnya mengakses internet untuk memperoleh informasi pembelajaran karena di sekolah para siswi tidak diperbolehkan untuk membawa *handphone* sehingga pembelajaran hanya terfokus dengan buku cetak saja.

Faktor pendukung Kurikulum Merdeka adalah kebebasan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan anak didik, banyaknya pelatihan-pelatihan Kurikulum Merdeka baik *online* maupun *offline*, sarana dan prasarana pendukung, dan tersedianya file-file modul ajar yang boleh dipakai oleh guru. Sementara itu, faktor penghambat dari pelaksanaan kurikulum merdeka di MA Diniyah Putri adalah kurangnya informasi dan referensi, dan keterbatasan siswa mengakses internet karena tidak diperbolehkan membawa *Handphone*. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap rapat akhir semester. Pada rapat akhir semester akan dibahas bersama laporan-laporan yang masuk dan dilihat apa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kurikulum merdeka setelah itu diputuskan tindak lanjutnya.

2. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemendikbud, perencanaan pembelajaran pada Kurikulum Merdeka terdiri dari beberapa tahapan yaitu memahami Capaian Pembelajaran (CP), merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP), menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan merancang modul ajar dan asesmen (Anggraena et al., 2022). Perencanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru telah disusun sesuai dengan kriteria Kurikulum Merdeka. Sebelum melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila guru telah membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar

Pendidikan Pancasila. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila guru menganalisis capaian pembelajaran (CP), menyusun tujuan pembelajaran (TP), menyusun alur tujuan pembelajaran (ATP), membuat dan mengembangkan modul ajar. Modul ajar Pendidikan Pancasila memuat informasi umum, komponen inti, dan lampiran.

Dalam modul ajar Pendidikan Pancasila model pembelajaran yang digunakan guru adalah PBL (*Problem Based Learning*) yang mana siswa diharapkan mampu memecahkan suatu masalah yang diberikan, siswa mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis, dan mengembangkan kemandirian siswa. Media pembelajaran yang digunakan guru adalah alat tulis, PPT, dan buku panduan Pendidikan Pancasila. Namun sumber belajar yang digunakan belum bervariasi yaitu hanya terfokus pada satu buku Pendidikan Pancasila saja. Pada akhir pembelajaran guru akan memberikan Asesmen Formatif seperti kuis dan tugas pengerjaan soal di buku cetak Pendidikan Pancasila

3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi dari perencanaan pembelajaran yang sudah disusun. Rencana pembelajaran dalam hal ini adalah modul ajar berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (Ita, 2018).

Penerapan Kurikulum merdeka pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru dilaksanakan secara berdiferensiasi, namun masih belum dapat terlaksana secara maksimal karena guru masih mengalami kendala dan masih dalam penyesuaian dengan kurikulum baru. Siswa memiliki gaya belajar dan kemampuan akademik yang berbeda-beda sehingga dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila guru membuat kelompok belajar yang terdiri dari siswa yang berbeda level kognitifnya dan juga memberikan tolak ukur yang berbeda dalam setiap evaluasi pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun (modul ajar) dan sudah sesuai dengan kriteria Kurikulum

Merdeka. Pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru mengajar dengan menggunakan media berupa alat tulis, PPT, dan buku Cetak Pendidikan Pancasila. Sumber belajar yang digunakan adalah buku cetak Pendidikan Pancasila. Model dan metode pembelajaran yang digunakan adalah PBL (*Problem Based Learning*) yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Dengan metode PBL ini siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan kemampuan belajar yang berbeda dan siswa akan berdiskusi untuk memecahkan kasus yang diberikan. Pada akhir pembelajaran siswa diberikan asesmen formatif berupa kuis dan pengerjaan soal latihan yang terdapat dalam Buku cetak Pendidikan Pancasila dari Penerbit Erlangga.

4. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka terdiri dari Asesmen formatif dan Asesmen Sumatif. Asesmen formatif disebut juga dengan Asesmen Diagnostik yang dilaksanakan di awal atau disaat proses pembelajaran berlangsung guna mengetahui kemampuan awal siswa, kebutuhan, dan kesulitan belajar siswa. Sementara itu asesmen sumatif dilaksanakan di akhir pembelajaran sebagai evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran (CP) sebagai dasar kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu satuan pendidikan.

Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah Asesmen Formatif berupa kuis, diskusi kelompok, ulangan harian, dan mengerjakan soal evaluasi dari buku cetak Pendidikan Pancasila. Sementara Asesmen Sumatif yang telah dilaksanakan adalah Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Asesmen formatif pada Pendidikan Pancasila telah terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan dari pernyataan peserta didik dan hasil observasi bahwa setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan evaluasi yaitu pengerjaan soal atau kuis terkait materi yang telah dipelajari pada hari tersebut. selain itu Asesmen sumatif

juga telah dilaksanakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila berupa Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS). Namun, untuk asesmen diagnostik belum terlaksana secara maksimal dalam pembelajaran

B. Pembahasan

Adapun pembahasan hasil dari penelitian "Analisis pelaksanaan kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru" akan dibahas secara detail perindikatornya sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan sesuai dengan informasi dari informan.

1. Implementasi Kurikulum Merdeka.

Implementasi Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri Pekanbaru baru mulai diterapkan pada kelas X tahun pelajaran 2023-2024 pada Fase E. Penerapan Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri Pekanbaru dibuktikan dengan adanya *SK Dirjen Pendis Tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun 2023-2024*.

Implementasi kurikulum merdeka di MA Diniyah putri pekanbaru baru bisa dilaksanakan pada tahun kedua dikarenakan pada tahun pertama pendaftaran untuk melaksanakan kurikulum merdeka hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, oleh sebab itulah MA Diniyah Putri pekanbaru yang merupakan madrasah swasta baru bisa menerapkan kurikulum merdeka pada tahun kedua yaitu pada kelas X tahun pelajaran 2023-2024. Implementasi Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri dilaksanakan berdasarkan *Pedoman dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*.

Sebelum madrasah mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti mempersiapkan para tenaga pendidik dengan memberikan pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka. Selanjutnya diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh ibu Elvi (44 tahun) selaku waka kurikulum yang mengatakan bahwa pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan agar guru faham dengan Kurikulum Merdeka sehingga dalam pelaksanaannya guru sudah dibekali pengetahuan mengenai awal pembelajaran, proses pembelajaran, hingga evaluasinya. Pembahasan

diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo dengan judul *Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar (2022)* bahwa pengimplementasian tidak dilaksanakan secara serentak dan masif mengacu pada kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Dalam jurnal ini juga dikatakan bahwa dalam hal mempersiapkan pengimplementasian kurikulum merdeka maka guru harus mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, mengikuti program guru penggerak dan sekolah penggerak, serta mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Pelatihan kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di MA Diniyah Putri Pekanbaru terdiri dari Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dan penyusunan KTSP, Pelatihan P5-PPRA (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin), IHT (*In House Training*) Menjadi Guru Hebat, pelatihan pengembangan modul ajar, pelatihan cara menilai dan evaluasi, pelatihan membuat soal ada pelatihan online melalui aplikasi pintar kemenag. Pembahasan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Syafi'i dengan judul *Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak (2022) yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan SDM sekolah. Bentuk dari pelatihan dan pendampingan melalui Learning Management System (LMS), Program Sekolah Penggerak (PSP), In House Training (IHT), Kelompok Kerja Guru, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).*

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara di MA Diniyah Putri Pekanbaru diketahui bahwa pengimplementasian Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Pancasila terdapat Kendala dan hambatan yang dialami karena cenderung masih baru sehingga banyak siswa dan guru yang merasa kebingungan sehingga dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka membutuhkan penyesuaian kurikulum yang cukup lama, sarana dan pra sarana yang masih terbatas, dan kurangnya pemahaman mengenai

pembuatan modul ajar yang menyebabkan guru kesulitan untuk mengembangkan modul ajar, keterbatasan waktu dalam pembuatan modul ajar, serta kurangnya informasi dan referensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Guru harus melakukan penyesuaian pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurikulum merdeka, Sementara guru belum sepenuhnya siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Angga dkk dengan judul "*Komparasi Impelemtasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar*" dengan pembahasan mengenai dampak penerapan kurikulum merdeka bagi guru dan siswa dengan hasil bahwa dampak yang dirasakan oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu Guru dituntut untuk kreatif inovatif dalam metode, media, dan teknik pembelajaran, serta Pola pikir berubah dalam melaksanakan pembelajaran.

Sementara itu kendala yang dialami oleh siswa dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah siswa tidak mendapatkan kebebasan belajar yang dimaksudkan dalam Kurikulum Merdeka yang mana harusnya siswa dapat belajar didukung dengan penggunaan teknologi dan akses internet. Namun di MA Diniyah Putri siswa tidak diperkenankan membawa *handphone* saat proses pembelajaran sehingga siswa kesulitan dalam mencari informasi mengenai pembelajaran. kebijakan sekolah untuk tidak memperbolehkan siswa membawa *handphone* karena di MA Diniyah Putri Pekanbaru terdapat siswa asrama dan non asrama sehingga tidak memungkinkan untuk membawa *handphone* ke sekolah.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada Solusi dan upaya pembelajaran pendidikan pancasila adalah dengan cara memperbanyak mencari informasi dan referensi mengenai Kurikulum Merdeka dengan cara diskusi dan sharing dengan guru-guru disekolah lain yang juga mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sebagai guru rajin mengikuti pelatihan-pelatihan yang membahas Kurikulum Merdeka dan aktif mengikuti MGMP (Musyawarah Guru mata Pelajaran) karena kerap mengundang narasumber yang

kompeten dan menguasai mengenai Kurikulum Merdeka. Upaya berikutnya adalah sekolah mengadakan rapat rutin dengan seluruh guru, kepala sekolah dan waka kurikulum guru, dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai kendala dan hambatan yang dialami oleh guru dan dicarikan solusinya. Sementara itu cara siswa menghadapi kendala adalah dengan mengunjungi lab komputer jika memang saat membutuhkan akses internet.

Evaluasi Kurikulum Merdeka rutin dilaksanakan pada setiap rapat akhir semester, rapat ini diikuti oleh seluruh tenaga pendidik disekolah mulai dari kepala sekolah, wakil kepala hingga para guru yang mengajar. Pada rapat ini akan dibahas mengenai apa saja kendala saat pelaksanaan kurikulum merdeka lalu baru ditentukan tindak lanjutnya sesuai dengan kendala yang dirasakan. Faktor pendukung dari implementasi kurikulum merdeka di MA Diniyah Putri Pekanbaru adalah banyaknya pelatihan kurikulum merdeka yang membantu guru secara *offline* dan *online* seperti pelatihan melalui Aplikasi Pintar Kemenag, tersedia pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan dan pedoman pelaksanaan kurikulum Merdeka dalam KMA Nomor 347 Tahun 2022, sehingga sudah bisa belajar lebih fleksibel dan bebas juga melalui. Sementara itu faktor penghambatannya yaitu kurangnya referensi dan informasi, keterbatasan akses internet bagi siswa karna peraturan sekolah.

2. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dari Kurikulum Merdeka. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Royani (kepala sekolah), Ibu Elvi (waka kurikulum), dan Ibu Sri (guru pendidikan pancasila) dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru adalah modul ajar. Pada saat perencanaan pembelajaran pendidikan pancasila guru sudah menyiapkan modul ajar yang

dirancang berdasarkan CP, TP, dan ATP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh *Eva ari astuti dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPAS kelas IV di SD Negeri 1 Kadipiro (2023)* bahwa dalam implementasi pembelajaran Kurikulum Merdeka harus membuat sebuah perencanaan berupa modul ajar yang sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka dan kebutuhan peserta didik.

Mekanisme penyusunan modul ajar di MA Diniyah Putri Pekanbaru dilaksanakan bersama-sama saat sesi pelatihan modul ajar yang dilaksanakan selama dua hari. Dalam menyusun modul ajar guru harus menganalisis dan menyesuaikan dengan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Dalam kurikulum merdeka terdapat enam fase pembelajaran yaitu Fase A (kelas 1 dan 2 SD), Fase B (kelas 3 dan 4 SD), Fase C (kelas 5 dan 6 SD), Fase D (kelas 7, 8, dan 9 SMP), Fase E (kelas 10 SMA), Fase F (kelas 11 dan 12 SMA), Guru juga menyesuaikan antara metode pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran serta asesmentnya. Modul ajar Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri dibuat berdasarkan dengan fase E sesuai dengan ketentuan dari kurikulum merdeka bahwa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Ujang Cepi Barlian, Siti Solekah, dan Puji Rahayu (2022) dengan *judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. JOEL: Journal Of Educational and Language Research, 1 (12), 2105-2118* bahwa Capaian Pembelajaran ditentukan oleh pemerintah, selanjutnya guru juga akan menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa.

Berdasarkan hasil dokumentasi, modul ajar pendidikan pancasila yang ada sudah memuat tiga komponen utama yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran yang sesuai dengan *ketentuan modul ajar menurut buku panduan pembelajaran dan asesmen yang ditulis oleh anggraena,dkk (2022)*, bahwa modul ajar harus memuat: 1. Informasi umum yang terdiri dari identitas penulis modul,

kompetensi awal, profil pelajar pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. 2. Komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan refleksi. 3. Lampiran yang terdiri dari lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka.

3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses pelaksanaan seluruh rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru (Widyanto,dkk,2020). Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembelajaran Fase E pendidikan pancasila sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka. Sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran pendidikan pancasila sudah memadai walau belum 100%. Pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila di MA Diniyah Putri Pekanbaru guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*), setelah selesai menyampaikan materi maka guru akan memberikan sebuah kasus untuk dianalisis oleh siswa. Siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar yang terdiri dari tipe siswa yang berbeda. Tiap kelompok terdiri dari tipe siswa yang rajin, pintar, dan tipe siswa yang hanya menerima saja. Dengan demikian siswa akan saling berkolaborasi dan bisa menyampaikan pendapatnya pada saat diskusi. Penilaiannya akan dibedakan oleh guru berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda.

Hal di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zain Sarnoto dengan judul *Model Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka (2024)* bahwa karakteristik dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi fokus pada konsep dan prinsip pokok materi pelajaran, penilaian kesiapan, dan

perkembangan belajar siswa yang diintegrasikan kedalam kurikulum, pengelompokan siswa secara fleksibel, dan peran aktif siswa sebagai penjelajah pembelajaran. Guru juga menggunakan media belajar yang dapat menunjang siswa untuk dapat memahami materi tersebut, media yang digunakan adalah papan tulis, PPT, infocus, dan buku cetak. Penyampaian materi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka. Pada awal pembelajaran guru sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami materi. Pada saat pembelajaran guru telah melaksanakan asesmen formatif berupa diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Hasil wawancara dan observasi ini diperkuat dengan adanya dokumentasi dan dokumen modul ajar.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa siswa merasa nyaman dan senang saat belajar dengan Kurikulum Merdeka karena dalam kegiatan belajar guru menyampaikan dengan cara yang menyenangkan, menggunakan metode yang bervariasi dan tidak membosankan. Siswa terlihat lebih aktif dalam kegiatan belajar pendidikan pancasila, ini dapat dilihat dari aktifnya para siswa menyampaikan pendapatnya mengenai suatu topik yang sedang dijelaskan oleh guru dan saat sesi diskusi. Saat menjelaskan materi guru menyampaikan dengan jelas dan mendetail disertai dengan cerita dan contoh-contoh yang sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar sehingga siswa dapat memahami materi dengan mudah. Jika ada siswa yang belum faham maka guru akan menjelaskan kembali hal tersebut. Pada akhir pembelajaran guru memberikan asesmen formatif berupa tugas untuk mengerjakan soal yang ada di buku cetak.

4. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.

Evaluasi pembelajaran pendidikan pancasila terdiri dari tiga asesmen yaitu, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilaksanakan pada awal pembelajaran guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Asesmen diagnostik ini nantinya juga berguna sebagai acuan

untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Asesmen formatif dilaksanakan pada saat pembelajaran pendidikan pancasila berlangsung, bentuk dari asesmen formatif ini berupa tugas diskusi kelompok, presentasi, kuis, ulangan harian, dan tugas dari buku cetak. Hal ini didukung dengan hasil observasi pada tanggal 16 Februari 2024, bahwa guru memberikan asesmen formatif berupa tugas diskusi kelompok dan presentasi. Selanjutnya pelaksanaan asesmen formatif diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 23 februari 2024 bahwa guru memberikan asesmen formatif berupa mengerjakan soal dari buku cetak.

Asesmen terakhir dalam pembelajaran pendidikan pancasila adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir bab pembelajaran, bentuk asesmen sumatif ini adalah penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Hal ini sejalan dengan hasil penelian oleh Fitri, D. A., Fariz, M. F. A., & Fajriyah, I. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah pada Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Jurnal Artefak, 11(1), 67-76* bahwa Asesmen sumatif dilaksanakan pada bab materi akhir di pembelajaran, Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Model evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri Pekanbaru sudah diterapkan pada kelas X tahun Pelajaran 2023-2024 dengan adanya SK Dirjen Pendis Tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun 2023-2024. Sebelum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan madrasah seperti mempersiapkan para tenaga pendidik dengan memberikan pelatihan-pelatihan Kurikulum Merdeka baik secara offline dan online melalui Aplikasi Pintar Kemenag. Pintar Kemenag merupakan aplikasi yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara online (*Massive Online Open Courses*) secara gratis bagi guru dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Implementasi Kurikulum Merdeka di MA Diniyah Putri berdasarkan pada KMA Republik Indonesia Nomor 347 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Kendala dan hambatan yang dialami karena cenderung masih baru sehingga sebagian besar guru dan siswa belum terbiasa dengan Kurikulum Merdeka sehingga membutuhkan penyesuaian kurikulum yang cukup lama, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan kurangnya pemahaman mengenai pembuatan modul ajar yang mengakibatkan guru kesulitan untuk mengembangkan modul ajar, keterbatasan waktu dalam pembuatan modul ajar, serta kurangnya informasi dan referensi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Guru harus melakukan penyesuaian pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurikulum merdeka, Sementara guru belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan maksimal.

Faktor pendukung dari implementasi Kurikulum Merdeka adalah adanya keleluasaan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar siswa, tersedia pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan dan Kemenag, Kurikulum Merdeka ini juga didukung dengan banyaknya pelatihan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka baik itu secara offline maupun online melalui Aplikasi Pintar Kemenag. Sementara itu faktor penghambatnya yaitu kurangnya referensi dan informasi, keterbatasan akses internet bagi siswa karna peraturan sekolah.

Perencanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka terdiri dari persiapan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, bahan ajar, materi ajar dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. modul ajar merupakan perangkat pokok yang harus ada dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu pada tahap perencanaan pembelajaran guru sudah menyusun modul ajar sesuai dengan panduan dari Kurikulum Merdeka. Dalam mempersiapkan pembelajaran guru telah menganalisis Capaian Pembelajaran (CP) yang mana CP inilah yang menjadi acuan untuk untuk menyusun tujuan pembelajaran (TP), dan alur tujuan pembelajaran (ATP).

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka. Sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Pancasila sudah memadai walau belum 100%. Dalam pembelajaran di kelas guru mengajar sesuai dengan modul ajar yang telah ada. Pada saat kegiatan pembelajaran guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Dalam proses pembelajaran di kelas guru menggunakan media berupa papan tulis, *Powerpoint*, dan *infocus*. Sumber belajar yang dipakai pada pembelajaran Pendidikan Pancasila adalah buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA kelas X dari Penerbit Erlangga.

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka terdiri dari tiga asesmen yaitu, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen Diagnostik berguna sebagai acuan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Asesmen formatif dilaksanakan pada saat pembelajaran pendidikan pancasila berlangsung, Sementara, asesmen sumatif dilaksanakan diakhir bab dan diakhir pembelajaran, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru asesmen sumatif terdiri dari PAT (Penilaian Akhir Tahun), Penilaian Akhir Semester (PAS), dan PTS (Penilaian Tengah Semester).

B. Saran

1. Bagi Sekolah.

Sekolah perlu mempertimbangkan untuk perizinan menggunakan handphone sebagai alat bantu pembelajaran sehingga siswa dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan serta sekolah hendaknya menambah persediaan *infocus* untuk menunjang proses pembelajaran.

2. Guru

Guru hendaknya dapat menggunakan instrumen yang lebih bervariasi lagi dalam mengukur kemampuan siswa, bisa dengan menambahkan penilaian proyek dan portopolio. Guru hendaknya menggunakan sumber belajar yang bervariasi tidak hanya berfokus pada satu sumber ajar saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Angga, cucu suryana, ima nurwahidah, D. (2022). Jurnal basicedu. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877-5889.
- Anggraena, dkk. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan AnakUsia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (1st ed.). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Barlian, U. C., & Solekah, S. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105-2118.
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 686-692.
- Fitri, D. A., Fariz, M. F. A., & Fajriyah, I. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Sejarah pada Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. *Jurnal Artefak*, 11(1), 67-76.
- Fussalam, Y. E. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 (K13) SMP Negeri 2 Sarolangun. *Jurnal Muara Pendidikan*, 3(1), 45-55.
- Ita, E. (2018). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di TK Rutosoro Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 45-52.
- Mantra, I. B. N., Pramerta, I. G. P. A., Arsana, A. A. P., Puspawati, K. R., & Wedasuwari, I. A. M. (2022). Persepsi guru terhadap pentingnya pelatihan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum merdeka. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6313-6318.
- Nugroho, T., & Narawaty, D. (2022). Kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe (2020-2021) atau kurikulum merdeka (2022) mata pelajaran bahasa inggris: suatu kajian bandingan. In *SINASTRA: Prosiding Seminar Nasional*

- Bahasa, Seni, dan Sastra* (Vol. 1, pp. 373-382).
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187.
- Sarnoto, A. Z. (2024). Model pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. *Journal on Education*, 6(3), 15928-15939.
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suryadi, (2018). Teori dan Praktik Penilaian. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 1. No. 1.
- Syafi'i, F. F. (2022, January). Merdeka belajar: sekolah penggerak. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar*.
- Widiyanto, I P., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Perencanaan Pembelajaran. *Satya Sastraharing: Jurnal Managemen*, 4 (2), 16-35